



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/376/K/411.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
DAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan dan penyesuaian terhadap ketentuan dalam pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Nganjuk;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah serta ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Provinsi Jawa Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Nganjuk;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Internasional Convention On The Elimination Of All Forms of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

M.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
d. merumuskan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

KETIGA : Masa tugas Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 2 (dua) tahun.

KEEMPAT : Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan; dan
b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi terkait di Daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

M.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/146/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

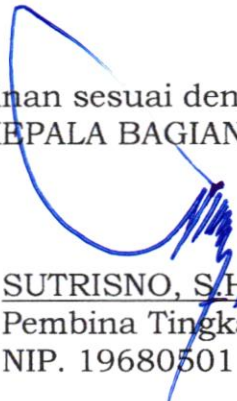
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 November 2023

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/376/K/411.013/2023
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN DEWAN
PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
DAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN NGANJUK

A. FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	NAMA	WAKIL DARI ETNIS
1	2	3	4
1.	Ketua	Drs. SUWARNO, M.Si.	Jawa
2.	Wakil Ketua	Drs. YUSUPH RANDA BUNGA, M.Si.	Toraja
3.	Sekretaris	Ir. AHMAD ZAKIN, M.Si.	Timur Tengah
4.	Bendahara	NURUL CHASANAH, S.E.	Jawa
5.	Bidang Aspirasi Pembauran Kebangsaan	a. Drs. RASID ANGGARA, M.M.;	Jawa
		b. LIWIDJAYA SOENARKO; dan	Tionghoa
		c. DAANS FRITSAM APONNO.	Ambon
6.	Bidang Forum Dialog Organisasi	a. DR GUNAWAN HARIYANTO, S.E., S.H., M.H.;	Tionghoa
		b. ANWAR SINURAT, S.Th., S.Pd., K.; dan	Batak
7.	Bidang Sosialisasi dan Kebijakan	a. DOMINGGUS JBTW DA COSTA;	Nusa Tenggara Timur
		b. HANY SANTOSO; dan	Tionghoa
		c. JEROME LANS M.Th.	Manado

ala

B. DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

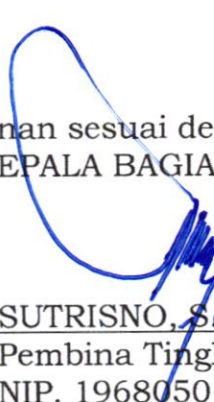
NO.	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PEMBINA FORUM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Ketua	Wakil Bupati Nganjuk
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	a. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; b. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk; c. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; d. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan f. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk.

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

M.